

NOTULENSI

Rapat Pansus Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hari/Tanggal : Jumat / 26 Juni 2026

Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Waktu : 08.30 WIB – Selesai

Dinamika Percakapan Rapat

- Pak Yusuf:
Membuka jalannya rapat dan menyampaikan harapannya agar draf Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini bisa disepakati bersama oleh seluruh pihak. Hal ini penting agar proses birokrasi selanjutnya bisa segera berjalan tanpa hambatan. Beliau meminta konfirmasi kepada seluruh pihak terkait mengenai kesiapan draf tersebut.
- Pak Sentot:
Memaparkan kesiapan draf, beliau menegaskan bahwa seluruh materi substansi Raperda telah disesuaikan dengan undang-undang di atasnya, termasuk aturan mengenai hubungan keuangan serta syarat penyaluran dana bantuan hukum. Beliau memastikan bahwa seluruh muatan lokal yang dibutuhkan sudah diakomodir dengan baik di dalam draf ini.
- Ibu Woro:
Menanggapi pemaparan tersebut, beliau menekankan bahwa permasalahan hukum merupakan hal yang paling krusial bagi masyarakat, sehingga pemerintah wajib hadir memberikan kepastian serta perlindungan hukum. Urusan mekanisme pembiayaan pun dipastikan sudah selesai diatur dan dianggarkan. Karena semua poin krusial sudah masuk, beliau menyatakan sepakat untuk membawa Raperda ini ke tahap finalisasi.
- Pak Yusuf:
Kembali melempar forum untuk persetujuan akhir. Anggota komisi B lainnya yang hadir menyatakan sepakat. Pak Yusuf mengonfirmasi bahwa kesepakatan ini diambil murni karena draf memang sudah matang dan semua poin sudah sesuai, bukan karena ingin buru-bur menyudahi rapat.
- Pak Sentot:
Di akhir penyampaian, beliau memohon dan meminta agar risalah resmi rapat bisa segera disusun, mengingat dokumen risalah tersebut bersifat sangat krusial sebagai syarat pengajuan Raperda ke tahap berikutnya.

Rangkuman Jalannya Rapat

Rapat diawali dengan Penyampaian dari bagian hukum yang mengkonfirmasi bahwa seluruh poin mengenai muatan lokal telah diakomodir dengan baik. Selain itu, ditekankan pentingnya penyediaan risalah resmi rapat serta kejelasan regulasi mengenai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum.

Dalam diskusi, perwakilan komisi B menyampaikan pandangan bahwa permasalahan hukum merupakan salah satu hal yang paling krusial di masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Ditambahkan juga bahwa urusan pembiayaan kini telah selesai diatur, sehingga pembahasan raperda ini dinyatakan telah siap masuk ke tahap finalisasi. Menanggapi pemaparan tersebut, seluruh anggota rapat yang hadir menyatakan sepakat dengan hasil penyesuaian draf yang telah dipaparkan.

Kesimpulan dan Keputusan Rapat

Komisi B dan Ketua Pansus menyatakan sepakat finalisasi terhadap Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kota Salatiga. Keputusan ini diambil karena seluruh poin dinilai sudah sesuai.